

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam era reformasi ini setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *good government governance* di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dan segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Laju reformasi tersebut sangat berpengaruh besar terhadap seluruh bidang birokrasi dalam mengelola pemerintahan yang baik karena hal tersebut menjadi suatu masalah utama dalam penyelenggaraan reformasi (Permadi, 2013) .

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bertujuan menyediakan atau memproduksi barang-barang publik. tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor privat/swasta. Organisasi sektor publik sering diidentikan dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada ditangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya, untuk itu Pemerintah daerah selaku pengelola dan publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya .

Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem akuntansi yang handal dan dapat memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial yang telah dicapainya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Halim, 2002). Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Informasi dalam laporan keuangan bermanfaat jika memenuhi karakteristik laporan keuangan yang sudah disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Bagian kerangka akuntansi konseptual pemerintahan, terdiri dari : 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami.

Laporan keuangan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Begitu juga entitas pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Windiyastuti, 2013).

Sumber daya manusia adalah faktor terpenting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, keberhasilan suatu entitas bukan hanya dari sumber daya manusia saja namun juga kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya, dalam hal ini kompetensi memiliki peranan penting untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Kadek Dkk, 2014).

Menurut Rovieyanti (2008), laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya yang kompeten yang didukung latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan pelaporan yang dibuat dan tidak kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Tingkat pendidikan sering kali menjadi indikator derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi tingkat pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan yang baik SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang dilatar belakangi pendidikan akuntansi atau keuangan (windiastuti, 2013).

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemahaman tentang sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah telah berupaya menyusun laporan keuangan sesuai sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik, namun tidak semua pegawai dalam pemerintahan yang memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan Kadek dkk (2014) tentang kompetensi SDM, penerapan SAP dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Buleleng Bali.

Menurut hasil penelitian Rovieyanti (2008) bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga pengawasan kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Nugraheni dan Subaweh (2008) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Bali, menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut permadi (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dilakukan di Dinas Bina Marga Jawa Barat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2014) yang berjudul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN** (studi empiris pada SKPD Kabupaten Ponorogo).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

### **1.3 Tujuan dan manfaat penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi pemerintah daerah

Sebagai bahan masukan yang berguna bagi pemerintah kabupaten Ponorogo khususnya SKPD untuk semakin meningkatkan kualitas dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Bagi pengembangan ilmu

Sebagai masukan yang berguna bagi pengembangan ilmu khususnya akuntansi sektor publik.

3. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang di teliti terutama mengenai sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang penyusunan laporan keuangan daerah.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan Sebagai referensi dan acuan yang berguna bagi penelitian berikutnya.